



Laporan Keanggotaan UD Pulau Mas dalam Seafood Savers

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan
oleh UD Pulau Mas periode (April 2016) –
(September 2016)

(Achmad Mustofa) - (Nasiona Capture Fisheries
Coordinator)

Informasi Umum

Pada periode ini, UD Pulau Mas mengalami masa yang cukup sulit dimana mereka terpaksa menghentikan usahanya untuk sementara waktu karena adanya isu tentang definisi bidang usaha yang dijalankan apakah masuk ke kategori budidaya atau tangkap, berdampak pada izin kapal angkut dari UD Pulau Mas yang dilarang beroperasi. Hal ini merupakan dampak dari adanya Permen KP No 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan.

Hal tersebut membuat UD Pulau Mas menghentikan proses transaksi selama 4 bulan (Mei – Agustus 2016). Selama proses tersebut, UD Pulau Mas melalui direktur utamanya, Heru Purnomo, melakukan kegiatan advokasi didampingi oleh WWF Indonesia untuk memperjelas definisi tentang perikanan tangkap dan budidaya sehingga aktifitas perusahaan dapat berjalan seperti sebelumnya.

Melalui proses advokasi tersebut, Pemerintah akhirnya menerbitkan Permen KP no 32 tahun 2015 untuk merevisi Permen KP no 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan. Melalui permen tersebut, izin kapal pengangkut ikan UD Pulau Mas kembali bisa diterbitkan dan perusahaan bisa beraktifitas seperti biasanya.

Link peraturan terkait : http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/1148/?type_id=1

Rincian evaluasi keanggotaan UD Pulau Mas berdasarkan *Fisheries Improvement Program (FIP)* yang telah dilaksanakan:

AKTIVITAS/TUGAS	OUTPUT DAN INDIKATOR UNTUK AKTIVITAS/TUGAS	DETAIL AKTIVITAS (untuk anggota Seafood Savers)	PEMIMPIN AKTIVITAS & MITRA		Tahapan SEAFOOD SAVERS	HASIL EVALUASI
			INTERMEDIATE	ADVANCE		
1.1.1. Memfasilitasi proses pengembangan EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan.	Tersedianya peraturan menteri mengenai EAFM dan peraturan lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSI, Agen KKP di Kabupaten & Provinsi			<p>Pengelolaan Perikanan melalui pendekatan ekosistem di Indonesia telah mendapatkan pengakuan pemerintah dan telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 18/ Kep-DJPT/ 2014*</p> <p>*Download Link : http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum</p> <p>Pemerintah mengatur alat tangkap trawl dan seine nets melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/ 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine</p>	


					<p>nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*</p> <p>*Download link : http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum</p>	
1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi EAFM dan/atau peraturan lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan.	Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai implementasi EAFM dan peraturan lain yang terkait dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan	Perusahaan			<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan menggunakan software yang dikembangkan oleh IBM dan melaksanakan pemasangan instrumen pendataan pada seluruh keramba • Perusahaan hanya membeli ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (handline) • Perusahaan menetapkan ukuran minimal tangkapan nelayan yaitu 500 gram 	Perusahaan masih belum bersedia membuka data via IBM untuk diolah


<p>1.2.1 Memfasilitasi peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai interpretasi dari peraturan kementerian mengenai rencana pengelolaan perikanan, yang mencakup Kaidah Pengendalian Penangkapan (Harvest Control Rule)</p>	<p>Tersedianya peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari rencana pengelolaan perikanan dengan harvest strategy</p>	<p>SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP</p>			<p>Harvest Strategy belum diaplikasikan karena masih dikembangkan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p><i>Secara nasional, proses ini masih terus dikawal oleh WWF Indonesia bekerjasama dengan pihak Komnaskajiskan. Training HCR yang melibatkan peneliti dari P4KSI, BPPL, dan akademisi telah dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli. Sedangkan tindak lanjut untuk penyusunan protokol pendugaan stok akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2015</i></p>
<p>1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan tindakantindakan seperti bagaimana diatur dalam rencana pengelolaan Provinsi/Kabupaten sebagai patron dalam perkembangan dan implementasi pada area tersebut. Rencana tersebut akan mencakup harvest control rule yang melibatkan prinsip keberlanjutan, contoh ukuran tangkap minimal, menyesuaikan jumlah usaha mengikuti kapasitas menampung stok</p>	<p>Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung perkembangan dan implementasi dari rencana pengelolaan Provinsi/Kabupaten yang melibatkan harvest control strategy-nya</p>	<p>Perusahaan</p>			<p>Harvest Strategy belum diaplikasikan karena masih dikembangkan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p><i>Secara nasional, proses ini masih terus dikawal oleh WWF Indonesia bekerjasama dengan pihak Komnaskajiskan. Training HCR yang melibatkan peneliti dari P4KSI, BPPL, dan akademisi telah dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli. Sedangkan tindak lanjut untuk penyusunan protokol pendugaan stok akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2015</i></p>

<p>1.2.3 Memfasilitasi peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari regulasi EAFM dan regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	<p>Tersedianya peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari regulasi EAFM dan regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	<p>SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP</p>		<p>Kabupaten Manggarai Barat menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Mesa dan Pulau Sababi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Manggarai Barat</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Mabar : http://bit.ly/1HWO9aH</p> <p>Download Link Ranperda Mabar : http://bit.ly/1ARYi2D</p> <p>Kabupaten Wakatobi menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Wakatobi. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Tomea dan Pulau Wangi-Wangi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Wakatobi</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Wakatobi :-</p> <p>Download Link Draft Ranperda Wakatobi : http://bit.ly/1DvxRXm</p> <p>Kabupaten Flores Timur menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur. Ranperda tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh Bupati dan sudah resmi menjadi Peraturan Bupati Kab. Flores Timur tentang Perikanan Berkelanjutan</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Flotim : Download Link untuk Perbup Flores Timur : http://bit.ly/1CqDYfT</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkahlangkah sebagaimana diatur dalam panduan EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan, sebagai patron dalam proses perkembangan dan implementasi dari EAFM pada tingkat Provinsi/Kabupaten</p>	<p>Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung perkembangan dan implementasi dari regulasi EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang berkelanjutan di Provinsi/Kabupaten</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Kabupaten Manggarai Barat menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Mesa dan Pulau Sababi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Manggarai Barat. UD Pulau Mas berpartisipasi aktif dalam penyediaan data dalam Naskah Akademis.</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Mabar : http://bit.ly/1HWO9aH</p> <p>Download Link Ranperda Mabar : http://bit.ly/1ARYi2D</p>	<p>Belum banyak terlibat dalam kegiatan terkait dengan EAFM atau kegiatan yang serupa. Undangan beberapa kali dikirimkan namun belum bisa hadir mengirimkan perwakilannya</p>
<p>1.3.1 Pengembangan dan adopsi dari rencana pengelolaan ikan karang di area tersebut</p>	<p>Rencana pengelolaan ikan karang telah tersedia dan telah di adopsi</p>	<p>SDI, agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Universitas Hasanudin Makassar</p>		<p>Dokumen Rencana Kerja Perikanan Karang di Indonesia telah tersedia Download link : http://bit.ly/1DvWIA1</p>	<p><i>Dokumen Reef Fish Action Plan telah tersedia, adopsi pada praktek perikanan perusahaan masih dilakukan dalam koridor FIP dengan WWF Indonesia</i></p>

<p>1.3.2 Perusahaan proactively support and implement the management plan (e.g. Provide letter on on the management plan, proactively attend meetings if required)</p>	<p>Perusahaan to be pioneer to support the development and implementation of area based fishery management plan (RPP WPP)</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Perusahaan terlibat dalam penyusunan RPP oleh Pemerintah yang diadakan pada tanggal 10-12 Maret 2015 di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Link Undangan : http://bit.ly/19v6HDI Dokumentasi :</p> 	<p><i>Dokumen RPP berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan saat ini sedang diproses di biro hukum KKP sebelum diimplementasikan sebagai lampiran dalam Peraturan Menteri. Permasalahan utama adalah ketidakadaan kuota dalam RPP tersebut, untuk mengantisipasi hal ini, dilaksanakan penyusunan protokol pendugaan stok ikan bersama dengan Komnaskajiskan</i></p>
--	---	-------------------	--	--	--

					
				<p>WWF Indonesia terlibat dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, 714, dan 715*</p> <p>*Download Link : dokumen belum final, masih berada dalam proses diskusi oleh Biro Hukum KKP</p>	
1.4.1 Menginisiasi workshop pada TURF (atau pengukuran RBM lainnya) yang juga akan mengidentifikasi pengukuran untuk pengembangan mekanisme	TURF (atau pengukuran RBM lainnya) untuk mencegah <i>overfishing</i> sudah diadopsi	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan, Universitas			Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon

		Hasanudin di Makassar				
1.4.2 Implementasi TURF (atau langkah RBM lain) untuk mengelola perikanan	TURF (or other RBM measures) management to avoid <i>overfishing</i> is implemented	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon	
1.4.3 Perusahaan memfasilitasi implementasi mekanisme TURF (atau langkah RBM lainnya)	Perusahaan menjadi pioneer dalam pengimplementasian TURF (atau langkah RBM lainnya)	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon
1.5.1 Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah system no take zone, baik untuk yang baru atau yang sudah ada	Tersedianya laporan yang mencakup informasi mengenai karang mana yang menopang perikanan dan karang mana yang tidak menopang no take zone	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link : Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link :	Pada tahap ini masih sebatas melaksanakan Inventarisasi no take zone

					Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC)	
1.5.2 Menentukan <i>no take zone</i> dengan peraturannya untuk mendukung perikanan yang bertanggungjawab.	Area no take zone dan regulasi untuk mendukung perikanan yang bertanggungjawab telah dikembangkan	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			<p>Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link :</p> <p>Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link :</p> <p>Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC) Download Link :</p>	Law enforcement masih rendah
1.5.3 Implementasi hasil deliniasi zona	No take zone yang baru telah diimplementasikan dan berfungsi secara penuh	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			<p>Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link :</p>	

					<p>Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link :</p> <p>Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC)</p>	
2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (e.g. peraturan kementerian) yang mendukung sub FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. satuan tugas) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perikanan ikan karang\	Otoritas perikanan ikan karang nasional untuk mengkoordinasi implementasi pengelolaan dari rencana pengelolaan perikanan berbasis area di tingkat provinsi/kabupaten	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan, Pemangku Kepentingan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
2.1.2 Secara aktif melibatkan industry, agen penelitian, dan Organisasi Lingkungan dalam pertemuan terkait pengambilan keputusan dalam perikanan	Otoritas pengelolaan perikanan dan rencana pengelolaan perikanan berbasis area bersifat kredibel dan didukung oleh semua pemangku kepentingan	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan, Pemangku Kepentingan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
2.1.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten (e.g menghadiri pertemuan)	Perusahaan to be pioneer to support the development and implementation of area based fishery management plan in Indonesia	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	

2.1.4 Memonitor dan evaluasi kinerja dari otoritas pengelolaan Provinsi/Kabupaten yang dilakukan oleh agen internal dan eksternal dari KKP dari Provinsi/Kabupaten yang bertanggungjawab untuk pengelolaan perikanan ikan karang	Otoritas Provinsi/Kabupaten pengelolaan perikanan ikan karang berfungsi dengan baik untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengelolaan dari rencana pengelolaan perikanan berbasis area	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan, Pemangku Kepentingan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (peraturan kementerian, peraturan direktorat jendral, dll) mengenai alokasi deskripsi pekerjaan kepada agen yang tepat untuk mendukung pengelolaan perikanan	Tugas yang didefinisikan untuk semua pemangku kepentingan, Satker Perikanan Ikan Karang, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta Komunitas	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, komunitas, pemangku kepentingan, Organisasi Lingkungan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.1.1 Workshop mengenai stock assessment; meliputi methodology dan analisis pengumpulan data, dan rencana sinkronisasi	Peran yang lebih jelas seputar agensi mana yang melakukan aktifitas terkait serta metodologi apa yang digunakan untuk stock assessment	P4KSI, BPPL dan Universitas Hasanudin Makassar			Pendugaan stok menggunakan Risk Based Framework sudah dilaksanakan, laporan tersedia Protokol pendugaan stok sedang dikembangkan oleh Komnaskajiskan	
3.1.2 Pelatihan mengenai stock assessment, biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan	Otoritas terkait stock assessment memiliki kapasitas untuk melakukan stock assessment menggunakan metodologi yang disetujui	P4KSI, BPPL dan Universitas Hasanudin Makassar			Pendugaan stok menggunakan Risk Based Framework sudah dilaksanakan, laporan tersedia	

3.1.3 Mengembangkan kebijakan perusahaan terkait komitmen untuk mendukung pengumpulan data untuk stock assessment dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi (logbook, wawancara, sample gonad, dll)	Perusahaan untuk menjadi pioneer dalam menyalurkan komitmennya untuk mendukung pengumpulan data terkait stock assessment untuk ikan karang di Indonesia	Perusahaan			Masih sebatas melaksanakan Risk Based Framework (PSa/ SICA) : Laporan tersedia	
3.2.1 Melakukan tinjauan ilmiah pada indicator stok ikan karang	Informasi mengenai indicator dari status stok ikan karang tersedia (informasi biologis ikan, dll)	P4KSI, BPPL dan Universitas Loka			Telah dilaksanakan kegiatan kajian status stok untuk perikanan karang di lima lokasi di Indonesia bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Download Link :	Penelitian lain yang terkait
3.3.1 Workshop pelatihan mengenai risk assessment, termasuk simulasi	Manajer dan peneliti perikanan memahami dan telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan risk assessment	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengumpul, Proessor			Workshop untuk pendugaan stok perikanan melalui PSA dan SICA telah dilaksanakan di lima lokasi di Indonesia	
3.3.2 Melaksanakan Risk Based Assessment	Informasi mengenai Risk based assessment yang diterapkan pada seluruh spesies target, ikan umpan dan <i>bycatch</i> tersedia	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas,			Workshop dan laporan untuk pendugaan stok perikanan melalui PSA dan SICA telah dilaksanakan dan tersedia untuk lima lokasi di Indonesia	

		Pengepul, Processor				
3.4.1 Studi mengenai LRP untuk Kerapu dan Kakap	Tersedianya LRP untuk kerapu dan kakap telah diidentifikasi	P4KSI/BPPL, Universitas di Makassar			Bekerjasama dengan Yvone Sadovy untuk melaksanakan riset dan kajian di lokasi keramba	Hasil riset tidak dishare oleh UD Pulau Mas
3.4.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data mengenai stock assessment untuk Ikan Karang di Indonesia	Perusahaan			-Perusahaan berpartisipasi aktif dalam menyediakan data untuk kajian stock status melalui metode PSA dan SICA yang dilaksanakan oleh tim Universitas Diponegoro	
3.5.1 P4KSI dan universitas lokal akan melaksanakan studi mengenai usaha terbaik yang diperbolehkan pada perikanan dan solusi untuk mengurangi usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya laporan mengenai studi, yang mencakup informasi mengenai jumlah usaha yang diperbolehkan untuk ditangkap dalam area terkait dan solusi yang direkomendasikan untuk mengurangi usaha • Menyediakan dokumen akademis untuk merekomendasikan reduksi usaha 	DKP Provinsi dan Kabupaten			<i>Belum dilaksanakan</i>	

3.5.2 Pemerintah lokal akan mengembangkan peraturan dan memfasilitasi implementasi untuk mengurangi usaha	Peraturan Provinsi/Kabupaten mengenai reduksi usaha telah tersedia dan difungsikan mengikuti rekomendasi ilmiah	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengumpul, Proessor			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.5.3 Perusahaan berpartisipasi dalam implementasi peraturan pada rantai suplai	Perusahaan menjadi pioneer dalam mengimplementasikan peraturan dari reduksi usaha	Perusahaan			Menerapkan peraturan pelarangan penggunaan sianida dan kompressor pada beberapa lokasi keramba sesuai dengan peraturan daerah yang ada (ex : Manggarai Barat)	
3.6.1 Workshop ke pemangku kepentingan lain mengenai pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi pengumpulan data dari stock assessment dilatih kepada pemangku kepentingan • Stakeholders berkomitmen untuk membantu proses pengumpulan data 	P4KSI, BPPL, SDI, Universitas, Industri (langsung dari haji dan perusahaan pembeli)			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.6.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data mengenai stock assessment untuk Ikan Karang di Indonesia	Perusahaan			Belum dilaksanakan keterlibatan minim	

(e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)						
3.6.3 P4KSI melaksanakan analisis dan pelaporan data	Laporan mengenai produktivitas stok tersedia	P4KSI			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.1 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data <i>bycatch</i> (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	Modul pelatihan diperkaya	SDI, KKJI, P4KSI, Universitas, PLN, KAPI, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.2 Pelatihan observers/enumerator	Observers/enumerator memiliki kapasitas untuk melaksanakan pengumpulan data	P4KSI, BPPL			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.3 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk stock assessment dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan memberikan akses kepada observer/enumerator untuk bekerja di kapal penangkap dan pengumpul ikan, yang juga melibatkan universitas lokal dan komunitas	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data untuk <i>bycatch</i> melalui mekanisme observer/enumerator	Perusahaan			Menerapkan sistem IBM dalam keramba yang langsung dilakukan oleh kepala	ketidaksediaan sharing data

3.8.1 Metodologi untuk system monitoring habitat telah diidentifikasi dan pelatihan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi monitoring telah diidentifikasi • Pelatihan telah dilaksanakan dan human resources sebagai pelaksana monitoring telah tersedia 	KKJI, NGO, Universitas, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Prosesor			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.8.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk monitoring habitat	Perusahaan menjadi pioneer atas pengumpulan data untuk habitat	Perusahaan			Memfasilitasi tim peneliti dari UNDIP pada beberapa lokasi (Togean, Kei, Banggai laut) untuk melaksanakan stock assessment dengan metode SICA	Laporan tersedia
3.8.3 Sistem monitoring dilaksanakan setiap tahunan	Laporan tahunan mengenai monitoring habitat tersedia dan digunakan sebagai bagian dari pengelolaan karang	KKJI, NGO, Universitas, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Prosesor				
3.9.1 Universitas lokal melaksanakan studi terkait	Laporan mengenai efek dari perikanan rawai dasar dan pancing ulur pada ekosistem tersedia	BPPL, Universitas Hasanudin di Makassar			Laporan PSA-SICA untuk perikanan karang tersedia	
3.10.1 Melaksanakan tinjauan assessment	Tersedianya laporan tinjauan yang juga digunakan untuk perbaikan pengelolaa dan penelitian	Independent reviewer				

4.1.1 Memfasilitasi pembentukan dari PokMasWas, mempersiapkan pengawasan dan rencana monitoring praktik penangkapan ikan (termasuk institutional dan capacity building)	Laporan regular per 6 bulan mengenai kinerja POKMASWAS tersedia	PSDP, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten/POK MASWAS			KKP melalui PSDKP memiliki kelompok pengawas masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Data pokmaswas tersedia.	
4.1.2 Monitor kinerja dari PokMasWas sebagai bagian dari system pengelolaan	6 months regular report on the performance of POKMASWAS available	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten/POK MASWAS			Data belum didapatkan	
4.1.3 Perusaha mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan pengoperasian PokMasWas	Perusahaan menjadi pioneer dalam implementasi POKMASWAS	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya, masih mengindik pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	
4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	Tersedianya regulasi untuk memastikan agar pelanggaran hukum berkurang	PSDP/MMAF Legal Department				
4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sangsi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang	Legislasi mengenai sanksi telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang menangkap ikan di perikanan ikan karang pesisir	PSDP/Departemen legal KKP, Nelayan				
4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi	Perusahaan menjadi pioneer dalam implementasi legislasi terkait	Perusahaan			Menerapkan beberapa peraturan terkait sustainable fisheries di kerambanya <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran minimal tangkap - Alat tangkap selektif - Larangan penggunaan sianida dan kompresor 	

4.3.1 Memfasilitasi pelatihan mengenai pengawasan kepada PokMasWas dan PSDP di tingkat Provinsi dan Kabupaten	Petugas pengawasan dan POKMASWAS telah terlatih	DKP District, BPPL, WWF and prosesor			<i>Laporan belum didapatkan MSC</i>	
4.3.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan lain untuk memperbaiki penegakan dan pengawasan	Workplan telah tersinkronisasi dan mendukung pengawasan kolaboratif	DKP District, BPPL, WWF dan prosesor, semua pemangku kepentingan				
4.3.3 Pelatihan mengenai langkah-langkah pengelolaan (spesies target, reduksi <i>bycatch</i> dan konsekuensi dari interaksi ekosistem) bagi penangkap ikan: <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan BMP untuk praktik perikanan berkelanjutan • Menggunakan BMP untuk meningkatkan kualitas ikan tinggi untuk mengurangi <i>overfishing</i> • Menggunakan BMP untuk mitigasi <i>bycatch</i> • Laporan keterlacakan 	Kapasitas nelayan meningkat terkait praktik-praktik perikanan berkelanjutan, menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas ikan yang mengurangi <i>overfishing</i> • <i>bycatch</i> ETP & juveniles berkurang • Berkurangnya IUU <i>fishing</i> 	Perusahaan			<i>Pelatihan BMP telah dilaksanakan pada beberapa lokasi keramba, misalnya di Selayar, Tolitoli, Togean</i>	<i>dokumen cetak BMP terbatas dan masih dalam proses revisi</i>
4.3.4 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang mendukung penegakan petugas yang bekerja di lapangan	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung penegakan aktifitas oleh entitas komunitas dan legal	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	

4.4.1 Memfasilitas pengumpulan dari laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan	Tersedianya kompilasi laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan sampai tingkat pemerintah	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten			<i>Belum dilaksanakan</i>	
4.4.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP	Laporan regular per 6 bulan tersedia di situs KKP	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten			Link untuk ke website : http://djpsdkp.kkp.go.id/	
4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan terkait pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan mengenai pelanggaran peraturan	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengawasan untuk perikanan	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
Telah terlibat di dalam studi mengenai kesempatan dan tantangan dari subsidi perikanan di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan	Laporan studi tersedia	PDN, PLN, BBRSE			<i>Belum dilaksanakan</i>	
Terlibat dalam studi subsidi perikanan	Perusahaan menjadi pioneer dalam studi subsidi perikanan di Indonesia	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Sejauh ini PT. UD Pulau Mas aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder